

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau dikenal dengan sebutan UMKM merupakan jenis usaha yang terbukti mampu memberikan kontribusi serta peran yang nyata pada sektor perekonomian. UMKM bahkan dianggap sebagai pokok utama alternatif pada perekonomian di Indonesia, karakteristiknya yang kuat, dinamis dan efisien mampu mendorong pembangunan ekonomi bangsa. Pemanfaatan UMKM terbukti mampu memaksimalkan potensi sumber daya yang ada, karena UMKM biasanya bergerak dalam sektor industri lokal dan tidak bergantung pada impor, dengan hasil yang beragam dan unik sehingga mampu bersaing di pasar ekspor. Perekonomian Indonesia dapat menunjukkan kemampuannya dalam memiliki fundamental yang kuat, apabila koperasi dan UMKM dapat menjadi pelaku utama dalam perekonomian nasional yang produktif serta memiliki daya saing (Alhusain, 2014 Hal : 2). Data dari Kementrian KUKM Indonesia pada Tuti & Dwijayanti (2014) menyatakan bahwa UMKM mampu memberikan kontribusi sebesar 56% untuk PDB (Produk Domestik Bruto), dengan jumlah UKM yang mencapai 56,6% juta serta 99,8% dari UMKM mampu menyerap 7% tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2013. Kontribusi UMKM yang besar terhadap perekonomian juga terjadi di banyak Negara, seperti yang dikutip dari Baas dan Schrooten (2006) menyatakan bahwa jumlah UKM di Negara maju mencapai 90% dari keseluruhan usaha serta mampu menyerap tenaga kerja 2/3.

Dari jumlah pengangguran yang terdapat di negara-negara tersebut. Kelebihan lai dari UMKM adalah dalam menciptakan produk-produk yang lebih bermanfaat dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara luas. Selain itu, peran strategis dari UMKM sebagai alternatif pengamanan masyarakat terhadap ancaman krisis dan turbulensi ekonomi (Probosari, 2014). Dibuktikan dengan keberhasilan sektor usaha

kecil dan menengah dalam bertahan serta mendinamiskan kondisi perekonomian Indonesia pada saat krisis ekonomi 1997.

Dibalik kontribusi UKM yang cukup baik terhadap perekonomian nasional, ternyata sektor ini masih menyimpan banyak kekurangan-kekurangan yang ada. UMKM masih lemah dalam kemampuan manajemen usaha, kualitas dan sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas, serta lemahnya akses ke lembaga keuangan, khususnya perbankan (Adiningsih, 2001). Persoalan – persoalan tersebut saling berkaitan sehingga dapat menghambat kemajuan UMKM itu sendiri. Maka dari itu perlunya pelaku UMKM mengetahui tentang penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Andriani, (2014) Hal : 5, menyatakan bahwa belum adanya kesamaan *mindset* antara persyaratan bank yang harus dipenuhi oleh UMKM, termasuk ketersediaan laporan keuangan dan *business plan* (rencana pengembangan usaha) merupakan kendala yang menyebabkan minimnya akses keuangan UMKM. Persyaratan inilah yang menyebabkan anggaran yang dikucurkan pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak dapat diserap secara maksimal oleh para pelaku UMKM. Pemerintah telah menargetkan penyaluran KUR senilai 20 triliun namun hanya terealisasi sebesar 14,8 Triliun. Penyebab rendahnya penyaluran KUR tersebut karena bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR sangat berhati – hati dalam penyaluran kredit, karena mereka tidak mendapat informasi yang memadai terkait kondisi UMKM (Rudiantoro dan Siregar, 2012).

Penyebab rendahnya penyaluran KUR tersebut sangat hati – hati dalam penyaluran kredit, karena mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait kondisi UMKM. Mayoritas pengusaha UMKM tidak mampu memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya (Baas dan Schrooten, 2006).

Dengan akuntansi memadai maka pengusaha UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit, seperti pembuatan laporan keuangan (Warsono,

2009). Namun pelaksana pembukuan tersebut merupakan hal yang sulit bagi UMKM karena keterbatasan pengetahuan mengenai akuntansi, rumitnya proses akuntansi, dan anggapan bahwa laporan keuangan bukanlah hal yang penting bagi UMKM (Said, 2009). Berbagai macam keterbatasan lain yang dihadapi UMKM adalah latar belakang pendidikan yang tidak paham akuntansi atau tata buku, kurang disiplin dalam melaksanakan pembukuan akuntansi, serta tidak adanya dana yang cukup untuk mempekerjakan akuntan atau pembeli software akuntansi untuk mempermudah pelaksanaan pembukuan akuntansi.

Informasi akuntansi sangat bermanfaat bagi UMKM, karena merupakan alat yang digunakan oleh pengguna informasi untuk pengambilan keputusan (Nicholls dan Holmes, 1998) dalam (Wahyudi, 2009). Informasi akuntansi dapat digunakan untuk mengukur dan mengkomunikasikan informasi keuangan perusahaan yang sangat diperlukan oleh pihak manajemen dalam merumuskan berbagai keputusan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi. UMKM seharusnya menyusun laporan keuangan sesuai dengan kondisi usaha agar pengguna dapat membaca dan mengerti kinerja dan posisi keuangan. Oleh karena itu, pembuat laporan keuangan harus lebih diperhatikan dari segi pengetahuan dan pengalamannya dalam menyusun laporan keuangan. Jika pengelola keuangan merasa tidak mampu dan tidak mempunyai pengalaman dalam mengelola keuangan, sebaiknya menyewa jasa akuntan agar mampu mempunyai laporan keuangan yang jelas (Ediraras, 2010 Hal : 152-158).

Pelaku UMKM di Indonesia masih banyak yang tidak membuat dan memakai informasi akuntansi dalam pengelolaan usahanya. Alhasil, jika ditanya tentang sejumlah aset yang dimiliki mereka tidak bisa mengungkapkannya. Menurut Idrus dalam Hanum (2013) adalah seorang manajer klinik usaha kecil dan koperasi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menyatakan bahwa para pengusaha kecil tidak memiliki pengetahuan akuntansi dan banyak diantara mereka yang belum memahami pentingnya pencatatan dan pembukuan bagi kelangsungan usaha mereka dan keberhasilan usaha. Minimnya pengetahuan sumber daya manusia (SDM) tentang

proses akuntansi membuat mereka merasa kesulitan dalam melakukan pencatatan terhadap apa yang terjadi di perusahaan.

Terkait kondisi tersebut, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) selaku penyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia membuat Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang telah disahkan pada 19 Mei 2009 dan berlaku efektif per 1 Januari 2011. Dengan adanya SAK ETAP ini kedepannya para pelaku UMKM ini mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih informatif dengan tujuan tentunya memberikan kemudahan bagi investor maupun kreditor untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi para pelaku UMKM. Namun demikian, pada kenyataannya tidak semua pelaku UMKM mengimplementasikan SAK ETAP. SAK ETAP ini masih dianggap masih terlalu kompleks dan tidak sesuai dengan kebutuhan pelaporan keuangan UMKM (SAK EMKM, 2016). Pada tahun 2016 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Ketua Dewan Pengurus Nasional IAI, Mardiasmo mengatakan “bahwa SAK EMKM diterbitkan untuk membantu meningkatkan akuntabilitas UMKM dan menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel”. Perihal tersebut sejalan dengan tujuan dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM yang menyatakan bahwa UMKM bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. SAK EMKM ini efektif per 1 Januari 2018.

Dalam SAK EMKM, laporan keuangan entitas disusun dengan menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha, sebagaimana juga digunakan entitas selain mikro, kecil, dan menengah, serta menggunakan konsep entitas bisnis.

Semua pihak sangat mengerti akan pentingnya laporan keuangan dalam usaha, tetapi kebanyakan UMKM di Indonesia ini belum semuanya mempraktikkan akuntansi di pencatatan keuangan para pelaku UMKM, masih banyak dari kalangan

para pelaku UMKM yang menghadapi kendala di dalam menyusun laporan keuangan SAK umumnya sendiri, memang sangat rumit untuk dipahami bahkan untuk diterapkan bagi skala Usaha Kecil Menengah, sehingga perlu adanya penerapan SAK EMKM bagi usaha skala kecil menengah dalam membuat laporan keuangan karena lebih mudah dipahami. Adanya SAK EMKM dengan prinsip kesederhanaan diharapkan memberikan kemudahan bagi UMKM dalam kegiatan ekonomi yang sangat penting bagi Indonesia. Dengan di implementasikannya SAK EMKM terhadap UMKM sangat diharapkan bisa membuat perkembangan UMKM di dalam perekonomian Indonesia. SAK EMKM memberikan kemudahan untuk UKM karena ketentuan pelaporan yang mudah dimengerti di dalam penerapannya. Namun pada kenyataannya SAK EMKM masih banyak sekali yang belum diterapkan pada para pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya mengingat bahwa SAK EMKM merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang baru dikeluarkan oleh IAI khusus untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.

Fenomena UMKM pada tahun 2017 – 2018 menjelaskan dalam beberapa sumber VIVA.co.id pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menggairahkan usaha mikro, kecil, dan menengah khususnya menghadapi masyarakat Ekonomi Asia. Meski difasilitasi agar cepat berkembang, ada sejumlah kendala yang membuat perkembangan UMKM berjalan lambat.

Kendala itu, diantaranya ialah dalam hal pembukuan. Di Kota Surabaya, Jawa Timur misalnya, dari seluruh UMKM yang ada hanya sebagian kecil yang terbilang bagus pembukuan usahanya.

Adapun objek penelitian yang akan diteliti adalah beberapa UMKM yaitu UMKM pada Kampung Kue di wilayah Surabaya Timur yang bergerak di bidang home industri dalam kategori manufaktur, dagang, jasa dengan skala kecil. Sama halnya dengan kondisi pada UMKM pada umumnya yang belum mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan pada laporan keuangannya, dimana UMKM Kampung Kue di Surabaya Timur hanya mencatat penjualan dan

pembelian yang masih sangat sederhana sehingga belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Menengah (SAK EMKM).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk penelitian yang berjudul “ **Penerapan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada UMKM Kampung Kue di Rungkut Surabaya**” .

## **1.2 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis yang membuat rumusan masalah dalam penelitian ini ialah :

- 1) Bagaimana penyusunan laporan keuangan UMKM dalam menerapkan SAK EMKM tahun 2018?
- 2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi UMKM dalam penerapan SAK EMKM tahun 2018?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian untuk memperoleh bukti factual atau ontetik mengenai :

- a) Untuk mengetahui cara penyusunan Laporan keuangan UMKM dalam rangka Penerapan SAK EMKM per 1 Januari 2018.
- b) Untuk mengetahui kendala yang dihadapi para pelaku UMKM dan memberikan solutif dalam rangka Penerapan SAK EMKM per 1 Januari 2018.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan akan bermanfaat bagi :

1. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam menyelesaikan pendidikan.

2. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan ilmu akuntansi dan sebagai bahan referensi yang dapat digunakan lain untuk penyusunan penelitian lebih lanjut mengenai SAK EMKM.

3. UMKM yang diteliti di Kampung Kue Surabaya

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi UMKM dalam menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM agar menjadi bahan evaluasi untuk periode selanjutnya.